

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Evy Lusia Ekawati, 2013, *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata: Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara*, Genta Press, Yogyakarta.

Harahap, Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Haswandi, 2023, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya: Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.

Kantor Pengacara Negara, 2021, *Petunjuk Teknis Penyelesaian/ Penghapusan Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta

Mulyadi, Lilik, 2020, *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Tuanakotta, Theodorus M., 2018, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Legal Roundtable, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusuf, Muhammad, 2013, *Miskinkan Koruptor! Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

B. Jurnal

Karina, Fitrizia Blessi, “Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 9, November 2017.

Mantili, Rai, “Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol. 4, No. 2, September 2019.

Putriyana, Nia dan Shintiya Dwi Puspita, “Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi,” *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 3, Desember 2014.

C. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Ayu, Inganta Rizqa dan Devita Kartika Putri, 2022, *The Potentials of The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) in Assisting Law Enforcement against Corruption Cases in Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sitompoe, Hotma P., Nindyo Pramono dan Eddy O.S Hiariej, 2016, *Pelaksanaan Asset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wicaksana, Adhi dan Tata Wijayanta, 2014, *Peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Pengembalian Aset Negara dengan Menggunakan Instrumen Perdata*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Makalah

Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara, 2014, “Laporan Perkara Gugatan Nomor: 904/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel antara Negara Republik Indonesia cq Presiden Republik Indonesia sebagai Penggugat melawan H.M Soeharto sebagai Tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai Tergugat II”, *Laporan Perkara*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta

Ramelan, 2012, “Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana”, *Naskah Akademik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

E. Internet

Tim Hukum Online, “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris->

menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/, diakses 12 Januari 2024.

Widyakso, Rendra, “Tahanan Atau Narapidana Berhadapan Dengan Hukum Perdata (Perkawinan)”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rendra-widyakso-s-h-s-h-m-h>, diakses 13 Maret 2024.

F. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024.

Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Nomor: PER-020/A/JA/07/2014 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945.